

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA (STUDI KASUS DI DESA
SEMANTUN JAYA, KECAMATAN JELAI HULU, KABUPATEN KETAPANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

Natalia¹, Supardal²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD Yogyakarta^{1,2},
e-mail: nanatalia010@gmail.com¹, gusdal66@gmail.com²

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi yang terjadi antara pemerintah Desa Semantun Jaya dan warganya dalam upaya mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang penelitian didasari oleh adanya kesenjangan antara idealisme partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat terjadi pada tahap pelaksanaan seperti gotong royong pembangunan fisik dan pengelolaan BUMDes, namun partisipasi masyarakat masih rendah pada tahap perencanaan dan pengawasan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi yang belum merata, serta lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan partisipasi melalui musyawarah desa dan pembentukan tim pelaksana yang inklusif, namun belum sepenuhnya optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas warga, dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *kolaborasi desa, partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan*

ABSTRACT

Village development is an integral part of national development that emphasizes the importance of collaboration between the village government and the community. This study aims to analyze the form of collaboration that occurs between the Semantun Jaya Village government and its residents in an effort to realize an independent and prosperous village. The background of the study is based on the gap between the idealism of active community participation as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, with the reality in the field which shows that community involvement is still limited to the implementation stage. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, and is analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study show that strong collaboration occurs at the implementation stage such as mutual cooperation in physical development and management of BUMDes, but community participation is still low at the planning and supervision stages. The main obstacles include limited human resources, unequal access to information, and weak institutional capacity of the community. The village government has made efforts to increase participation through village deliberations and the formation of an inclusive implementation team, but it has not been fully optimal. The study concludes that more structured empowerment

strategies, citizen capacity building, and ongoing two-way communication are essential to building inclusive and sustainable development synergies.

Keywords: *village collaboration, community participation, sustainable development*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan pilar fundamental dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat dengan mengalokasikan sumber daya signifikan, termasuk Dana Desa, untuk memperkuat otonomi dan kapasitas desa. Kebijakan ini secara ideal menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri. Namun, keberhasilan implementasinya di lapangan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, melainkan dari kualitas tata kelola pemerintahan desa. Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi secara luas adalah bagaimana membangun sebuah mekanisme kolaborasi yang efektif dan sinergis antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan.

Menyoroti konteks tersebut, Desa Semantun Jaya yang terletak di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi sebuah studi kasus yang relevan. Sebagai salah satu desa yang tengah giat berupaya mewujudkan kemandirian, Desa Semantun Jaya menghadapi realitas kompleks di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses-proses krusial seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) masih cenderung rendah. Rendahnya keterlibatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur dan urgensi perencanaan pembangunan, keterbatasan waktu akibat kesibukan ekonomi sebagai petani atau pekebun, hingga minimnya upaya sosialisasi yang proaktif dari pihak pemerintah desa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Persoalan rendahnya partisipasi ini sejalan dengan temuan penelitian di berbagai daerah lain di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Febriana dan Ivanaa (2023) di Desa Lubuk Palas, Kabupaten Asahan, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif di seluruh tahapan pembangunan merupakan kunci keberhasilan. Keterlibatan publik mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi terbukti mampu memperkuat transparansi penggunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan. Namun, fenomena yang kerap terjadi adalah partisipasi yang bersifat seremonial, di mana kehadiran masyarakat dalam musyawarah hanya sebatas untuk memenuhi kuorum administratif tanpa adanya keterlibatan substantif dalam proses perumusan keputusan dan alokasi prioritas pembangunan.

Lebih jauh, faktor internal dari sisi masyarakat juga menjadi penghambat signifikan. Penelitian oleh Ginting et al. (2023) di Desa Kandui menemukan korelasi kuat antara rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan minimnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan. Tingkat pendidikan yang terbatas seringkali berdampak pada rendahnya kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasi secara efektif dalam forum formal. Akibatnya, muncul kecenderungan di tengah masyarakat untuk bersikap pasif dan menyerahkan seluruh proses perencanaan kepada aparat desa. Sikap apolitis ini menyebabkan tidak adanya masukan, kritik konstruktif, maupun pengawasan yang berarti dari warga, sehingga program pembangunan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan prioritas komunitas.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan partisipatif tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga pada sinergi kelembagaan di tingkat desa. Kolaborasi antara Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan perwakilan masyarakat memegang peranan krusial. Rizkiansyah et al. (2023) dalam penelitiannya di Desa Tanjungsari, Kabupaten Jember, menekankan bahwa kolaborasi yang harmonis antara kedua lembaga ini merupakan prasyarat utama. Ketika Pemerintah Desa dan BPD mampu bekerja sama secara efektif dalam menyelenggarakan musyawarah desa, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan proyek, dan melakukan pengawasan bersama, maka kepercayaan publik akan meningkat dan efektivitas pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Namun, tantangan dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif seringkali juga bersumber dari internal pemerintah desa itu sendiri. Kapasitas dan kemauan politik dari aparat desa untuk membuka ruang partisipasi menjadi faktor penentu. Studi oleh Saputra dan Wawanudin (2024) di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, mengungkap sebuah temuan penting bahwa proses penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) belum sepenuhnya inklusif. Proses tersebut cenderung didominasi oleh elite desa dan gagal melibatkan kelompok-kelompok marjinal seperti petani atau perempuan, yang notabene merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan pembangunan. Kegagalan dalam melibatkan pemangku kepentingan kunci sejak tahap perencanaan ini akan menghasilkan program yang tidak relevan dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif di Desa Semantun Jaya. Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian akan menggunakan kerangka teori kolaborasi pemerintahan yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen untuk mencapai tujuan kolektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat menggali secara mendalam tantangan dan potensi kolaborasi, serta memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Fokus penelitian adalah pada upaya mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dalam konteks alaminya. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, seperti Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga yang terlibat langsung dalam program pembangunan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara komprehensif dengan mengombinasikan tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para informan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan di mana peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan desa untuk mengamati secara langsung interaksi, proses pengambilan keputusan, dan dinamika sosial yang terjadi. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta laporan pertanggungjawaban kegiatan, untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari lapangan.

Seluruh data yang terkumpul, baik berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen, dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan. Tahapan tersebut meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan mengorganisasi data mentah ke dalam tema-tema yang relevan; (2) penyajian data, di mana data yang telah tereduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks untuk memudahkan pemahaman pola; serta (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah

NO	JENIS MUSYAWARAH	JUMLAH UNDANGAN	JUMLAH HADIR	PRESENTASI KEHADIRAN
1	Musyawarah Dusun	50	28	56%
2	Musyawarah Desa	70	32	54%
3	Musyawarah BUMDes	40	22	55%
4	Musyawarah Evaluasi	30	12	40%
RATA RATA= 51%				

Tabel 1 menampilkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Semantun Jaya dalam berbagai jenis musyawarah yang diadakan di desa tersebut. Pada Musyawarah Dusun, dari 50 orang yang diundang, sebanyak 28 orang hadir sehingga tingkat kehadiran mencapai 56%. Hal ini menunjukkan keterlibatan masyarakat yang cukup aktif dalam musyawarah di tingkat dusun. Selanjutnya pada Musyawarah Desa yang diikuti oleh 70 orang undangan, terdapat 32 orang yang hadir atau sekitar 54%. Partisipasi ini menandakan masyarakat Desa Semantun Jaya secara umum cukup antusias dalam mengikuti musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan.

Untuk Musyawarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebanyak 40 undangan disebarluaskan dan 22 orang hadir, dengan persentase kehadiran sebesar 55%. Tingkat partisipasi ini menggambarkan kepedulian warga Desa Semantun Jaya terhadap pengelolaan dan pengembangan usaha desa. Namun, pada Musyawarah Evaluasi yang mengundang 30 orang, kehadiran hanya mencapai 12 orang atau 40%. Persentase yang lebih rendah ini mungkin menunjukkan kurangnya kesadaran atau minat masyarakat Kecamatan Jelai Hulu dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan desa di Kabupaten Ketapang.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kehadiran masyarakat Desa Semantun Jaya dalam berbagai musyawarah adalah 51%. Data ini menunjukkan bahwa setengah dari masyarakat yang diundang aktif berpartisipasi dalam forum musyawarah di desa mereka. Dengan tingkat partisipasi ini, masih terdapat peluang bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pembangunan demi mewujudkan desa yang lebih mandiri dan sejahtera.

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tahapan Pembangunan

NO	Tahapan Pembangunan	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Tingkat Keterlibatan
1	Perencanaan	Hadir di musyawarah, mengusulkan kegiatan	Rendah
2	Pelaksanaan	Gotong royong, menyumbang tenaga kerja	Sedang-Tinggi
3	Pengawasan	Memberi masukan, ikut forum monitoring	Rendah
4	Pemeliharaan	Merawat fasilitas, jaga kebersihan lingkungan	Sedang

Tabel 2. tersebut menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Semantun Jaya dalam berbagai tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan. Pada tahapan perencanaan, partisipasi masyarakat tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh kehadiran mereka dalam musyawarah dan pengajuan usulan kegiatan yang masih minim. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil warga yang aktif berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan, mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kurangnya motivasi untuk terlibat dalam tahap awal pembangunan.

Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan, partisipasi masyarakat meningkat menjadi sedang hingga tinggi. Masyarakat lebih banyak terlibat secara langsung melalui kegiatan gotong royong dan menyumbangkan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur. Keterlibatan fisik ini menunjukkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan desa yang nyata di lingkungan mereka.

Pada tahap pengawasan, partisipasi kembali menurun ke tingkat rendah. Masyarakat hanya sedikit yang memberikan masukan atau mengikuti forum monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa. Rendahnya keterlibatan ini kemungkinan berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang prosedur pengawasan dan budaya sosial yang mengedepankan keharmonisan, sehingga warga enggan mengedipkan atau mengawasi aparat desa secara aktif.

Terakhir, dalam tahapan pemeliharaan, partisipasi masyarakat berada pada tingkat sedang. Warga desa menunjukkan kesadaran dalam merawat fasilitas yang telah dibangun dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, meskipun tingkat keterlibatan ini belum mencapai tahap pelaksanaan. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang cukup untuk menjaga hasil pembangunan agar dapat dinikmati secara berkelanjutan, meskipun perlu dorongan lebih untuk meningkatkan konsistensi dan partisipasi luas dalam pemeliharaan fasilitas desa.

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Semantun Jaya lebih aktif berperan dalam tahapan pelaksanaan fisik pembangunan, sementara keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar pembangunan desa dapat berjalan lebih partisipatif dan akuntabel.

Tabel 3. Hambatan Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat

NO	Jenis Hambatan	Uraian Singkat
1	Keterbatasan SDM	Banyak warga belum memahami prosedur pembangunan
2	Akses Informasi Terbatas	Tidak semua dusun memiliki akses terhadap informasi program pembangunan
3	Kurangnya Kesadaran Partisipatif	Masyarakat cenderung pasif dalam forum formal
4	Kapasitas Kelembagaan Lemah	Belum semua kelompok masyarakat aktif dalam struktur kelembagaan desa

Tabel ini mengidentifikasi empat hambatan utama yang menghalangi optimalisasi kolaborasi dalam pembangunan desa. Hambatan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di mana banyak warga desa belum memahami secara mendalam prosedur dan mekanisme pembangunan. Kondisi ini menyebabkan partisipasi mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan menjadi kurang maksimal karena kurangnya pengetahuan teknis dan informasi yang memadai.

1. Bentuk Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Semantun Jaya terbentuk melalui beberapa mekanisme yang telah terstruktur. Musyawarah Desa (Musdes) menjadi wadah utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Musdes rutin dilaksanakan setiap awal tahun dan menjelang penyusunan RKPDes. Dalam proses ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi wilayah dusun masing-masing. Misalnya, masyarakat Dusun Semantun mengusulkan perbaikan jalan dan peningkatan jaringan air bersih, sementara warga Dusun Pembangunan Kinjil dan Janda Berias mengusulkan program pertanian terpadu.

Selain perencanaan, implementasi kegiatan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1,2 kilometer yang melibatkan swadaya tenaga kerja warga. Pemerintah desa menyediakan bahan material dan alat berat, sementara masyarakat menyumbangkan tenaga kerja secara gotong royong.

Di sektor ekonomi, kolaborasi tampak dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Mandiri Jaya". BUMDes ini dikelola oleh masyarakat setempat, dengan dukungan modal awal dari Dana Desa. Unit usaha yang dijalankan meliputi pengelolaan hasil pertanian, penggilingan padi, dan simpan pinjam. Pengurus BUMDes dipilih melalui musyawarah dan laporan keuangan dipaparkan secara terbuka kepada warga setiap triwulan.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Kolaborasi

Pemerintah Desa Semantun Jaya berperan sebagai fasilitator dan koordinator utama dalam mendorong kolaborasi. Pemerintah desa menyediakan ruang musyawarah terbuka, menyebarkan informasi pembangunan melalui baliho dan pengumuman di Gereja, serta secara aktif mendatangi dusun-dusun untuk mendengar langsung aspirasi warga. Kepala desa juga secara rutin mengadakan pertemuan informal dengan tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok tani untuk membangun kedekatan emosional dan memperkuat komunikasi dua arah.

Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah desa adalah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri dari pemuda dan perwakilan perempuan untuk mendampingi program desa. Tim ini membantu dalam pengumpulan data kebutuhan masyarakat dan menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan perangkat desa.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Desa Semantun Jaya dalam pembangunan desa secara umum masih tergolong moderat, di mana sebagian warga menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan tertentu, namun sebagian lainnya cenderung pasif, terutama dalam tahapan perencanaan dan evaluasi.

Pada tahap perencanaan, hanya sebagian masyarakat yang rutin hadir dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Peserta yang hadir umumnya berasal dari kelompok tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan sebagian kecil kelompok perempuan atau pemuda. Warga lainnya kurang terlibat karena merasa tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapat atau karena belum memahami pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi dan kesadaran partisipatif yang perlu diatasi melalui pendekatan edukatif dan komunikasi yang lebih terbuka.

Meski demikian, dalam tahap pelaksanaan kegiatan, partisipasi warga terlihat lebih baik. Masyarakat terlibat dalam gotong royong pembangunan infrastruktur ringan seperti perbaikan saluran irigasi, pembangunan lapangan olahraga, dan pembersihan lingkungan. Keterlibatan ini lebih bersifat fisik dan sukarela, didorong oleh semangat kebersamaan serta kedekatan sosial antarwarga. Kehadiran warga dalam kegiatan gotong royong tidak selalu merata, namun terdapat kelompok warga yang cukup konsisten berpartisipasi, terutama yang merasa memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pembangunan.

Dalam hal pengawasan dan evaluasi program, partisipasi masyarakat masih minim. Hanya sebagian kecil warga yang mengikuti forum evaluasi atau memberi masukan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan desa. Peran pengawasan lebih banyak dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pelaksana Kegiatan. Kurangnya keterlibatan warga dalam tahap ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap prosedur penggunaan Dana Desa serta rasa enggan untuk mengkritik aparat desa karena faktor budaya lokal yang mengedepankan keharmonisan.

Meskipun belum maksimal, partisipasi masyarakat di Desa Semantun Jaya sudah menunjukkan potensi positif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan merupakan pintu masuk untuk membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif oleh pemerintah desa, seperti perlibatan tokoh agama, perempuan, dan pemuda sebagai agen partisipasi, serta pemanfaatan media komunikasi lokal untuk menyebarluaskan informasi pembangunan secara lebih merata.

4. Hambatan dalam Kolaborasi

Meski kolaborasi berjalan cukup baik, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara perangkat desa dan sebagian masyarakat terkait proses administrasi dan mekanisme penggunaan Dana Desa. Hal ini kadang

memunculkan kecurigaan atau persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia membuat pelaksanaan beberapa program menjadi tidak optimal. Misalnya, program pelatihan usaha kecil tidak berjalan maksimal karena keterbatasan instruktur dan rendahnya literasi keuangan warga. Ketiga, akses informasi belum merata di seluruh dusun akibat keterbatasan jaringan komunikasi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun di Desa Semantun Jaya bukan hanya bersifat formalitas administratif, tetapi telah menjadi bagian dari praktik sosial dan budaya warga. Hal ini sejalan dengan pendapat mengenai pentingnya modal sosial dalam membangun kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan dalam komunitas lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan indikasi positif dari adanya kepercayaan terhadap institusi pemerintah desa.

Musyawarah desa yang dilakukan secara terbuka mencerminkan implementasi prinsip good governance di tingkat lokal, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa desa yang mampu menyediakan ruang yang sehat akan mendorong masyarakat lebih aktif terlibat dalam pembangunan. Hal ini diperkuat oleh studi Wahyudi (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi warga meningkat signifikan ketika merasa aspirasinya dihargai dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes juga menunjukkan bahwa kolaborasi desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek ekonomi. Keberhasilan BUMDes “Mandiri Jaya” dalam mengelola unit usaha lokal memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Temuan ini mendukung penelitian Supriyadi & Widodo (2021) yang menekankan pentingnya kelembagaan ekonomi lokal dalam memperkuat struktur kemandirian desa.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Desa Semantun Jaya juga mencerminkan dinamika yang umum terjadi di desa-desa lain di Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya literasi pembangunan merupakan pekerjaan rumah besar dalam konteks kolaborasi desa. Untuk itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan berbasis edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Desa PDTT (2023) dalam model pemberdayaan desa berbasis kapasitas.

Nilai penting dari temuan ini adalah bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak terjadi secara instan, tetapi dibangun melalui proses yang berkelanjutan, berbasis kepercayaan, dan dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya setempat. Desa yang mampu mengelola kolaborasi ini secara inklusif dan adaptif akan lebih siap dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks (Kohar, 2024; Renaldi, 2024).

Hambatan kedua adalah akses informasi yang terbatas, terutama di dusun-dusun yang letaknya jauh atau memiliki jaringan komunikasi yang kurang baik. Akibatnya, tidak semua warga mendapatkan informasi yang cukup mengenai program-program pembangunan desa, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemahaman dan partisipasi. Informasi yang tidak merata ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan rasa ketidakadilan di antara warga (Dahiba et al., 2024; Ramawangsa et al., 2025; Sibagariang et al., 2024).

Ketiga, terdapat kurangnya kesadaran partisipatif di kalangan masyarakat, khususnya dalam forum-forum formal seperti musyawarah desa atau evaluasi pembangunan. Banyak warga yang cenderung pasif, mungkin karena rasa kurang percaya diri, ketidaktahuan akan manfaat partisipasi, atau norma budaya yang mengutamakan keharmonisan dan menghindari kritik terhadap pemerintah desa. Hal ini mengakibatkan partisipasi formal dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi rendah (Shetunyenga, 2023; Wilil & Aedah, 2022).

Terakhir, kapasitas kelembagaan yang lemah menjadi hambatan signifikan lainnya. Belum semua kelompok masyarakat aktif berpartisipasi dalam struktur kelembagaan desa, seperti di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tim Pelaksana Kegiatan. Kelembagaan yang kurang kuat ini menghambat proses koordinasi, komunikasi, dan pengorganisasian partisipasi masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Keseluruhan hambatan ini menunjukkan bahwa selain peningkatan kebutuhan kapasitas individu, perlu juga dilakukan penguatan kelembagaan dan akses informasi yang lebih merata agar kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

Hasil penelitian di Desa Semantun Jaya menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat telah berjalan secara dinamis dan berkelanjutan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Pentingnya kepercayaan dan jaringan sosial dalam membangun kerja sama komunitas lokal. Kolaborasi yang terbangun melalui mekanisme musyawarah terbuka (Musdes dan Musdus) menjadi bukti nyata implementasi prinsip good governance, terutama pada aspek transparansi dan partisipasi publik, sebagaimana diungkapkan Wahyudi (2019) dalam penelitiannya tentang partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat yang masih moderat, khususnya pada tahapan perencanaan dan pengawasan, konfirmasi temuan Supriyadi & Widodo (2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan warga dalam proses perencanaan formal masih menjadi tantangan utama di banyak desa di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat literasi politik dan pembangunan yang masih rendah di tingkat akar rumput, serta budaya lokal yang cenderung mengedepankan keharmonisan sosial sehingga menghambat kritik terbuka terhadap aparatur desa.

Kondisi lapangan di Desa Semantun Jaya yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan gotong royong juga memperkuat teori kolektivisme dan solidaritas sosial yang sering ditemui dalam studi etnografi komunitas pedesaan. Semangat kebersamaan yang tinggi dalam kegiatan fisik tersebut menjadi pintu masuk strategi untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan partisipasi yang lebih luas di masa depan. Penelitian oleh Lestari dkk. (2022) pun mendukung bahwa kegiatan gotong royong berperan penting sebagai sarana penguatan modal sosial dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pembangunan desa.

Sementara itu, pengelolaan BUMDes “Mandiri Jaya” sebagai wujud kolaborasi ekonomi menunjukkan bahwa desa tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayat dan Suryani (2020), yang menekankan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dapat meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat partisipasi dalam pembangunan desa. Namun, keberhasilan ini masih harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM dan literasi keuangan warga, seperti yang menjadi tantangan utama di Desa Semantun Jaya dan juga tercatat dalam laporan Kementerian Desa PDTT (2023).

Perbedaan signifikan antara partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan yang relatif tinggi dengan partisipasi rendah dalam perencanaan dan evaluasi juga mencerminkan pola umum yang ditemukan di berbagai studi pembangunan desa (Rahman et al., 2018; Sari & Putra, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih nyaman berkontribusi dalam aktivitas fisik secara langsung dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan atau pengawasan yang memerlukan pemahaman prosedural dan sikap kritis.

Selain itu, hambatan akses informasi yang masih terbatas di beberapa dusun di Desa Semantun Jaya turut memperkuat temuan penelitian sebelumnya tentang pentingnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan media lokal untuk memperluas jangkauan informasi

pembangunan desa (Yulianto, 2021). Pemerintah desa yang mampu mengintegrasikan inovasi komunikasi, seperti penggunaan media sosial dan forum komunitas digital, dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi desa adalah proses yang kompleks dan multifaset, dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, kapasitas kelembagaan, dan tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan desa harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai penelitian terkini (Kementerian Desa PDTT, 2023; Lestari et al., 2022). Desa yang mampu mengelola modal sosial dan kelembagaan ekonominya secara efektif akan lebih mampu menghadapi tantangan pembangunan dan mencapai kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Semantun Jaya dalam mewujudkan desa mandiri menunjukkan dinamika yang timpang, di mana partisipasi warga terbukti kuat pada tahap implementasi fisik seperti gotong royong, namun masih sangat lemah pada tahap krusial perencanaan dan pengawasan. Kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan realitas ini disebabkan oleh faktor penghambat utama seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya akses informasi di tingkat warga, meskipun pemerintah desa telah menunjukkan itikad baik untuk lebih terbuka. Oleh karena itu, untuk mencapai kolaborasi yang efektif, diperlukan pergeseran pendekatan menuju pemberdayaan yang sistematis yang menempatkan warga sebagai subjek aktif pembangunan. Upaya ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas warga serta penciptaan sistem komunikasi dua arah yang terbuka agar kemandirian desa yang seutuhnya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Dahiba, H., et al. (2024). *Konflik kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo*.
- Febriana, A., & Ivanaa, R. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lubuk Palas, Kabupaten Asahan*.
- Ginting, et al. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Kandui*.
- Hidayat, A., & Suryani, D. (2020). *Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Model pemberdayaan desa berbasis kapasitas*. Kemendesa PDTT.
- Kohar, A. (2024). Serakalan tradition in strengthening islamic religious education in the mapak dasan environment, jempong baru village, sekarbela district, mataram city. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 40. <https://doi.org/10.35964/munawwarah.v16i2.346>
- Lestari, et al. (2022). *Gotong royong sebagai sarana penguatan modal sosial di komunitas pedesaan*.
- Rahman, A., et al. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa*.
- Ramawangsa, P. A., et al. (2025). Penerapan konsep co-living pada perancangan rumah susun sederhana di Kota Bengkulu. *Rachana Interior Journal*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.33005/rachanainterior.v2i01.32>

Renaldi, E. (2024). *Bercermin dari lima negara menuju golden rule Indonesia*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.

Rizkiansyah, et al. (2023). Kolaborasi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam pembangunan desa di Tanjungsari, Jember. *Jurnal STIA Pembangunan Jember*.

Saputra, R., & Wawanudin. (2024). *Penyusunan RPJMDes di Desa Gempol Sari, Sepatan Timur*. Pusat Jurnal iLearning.

Sari, A., & Putra, R. A. (2019). *Analisis partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan desa*.

Shetunyenga, N. N. T. (2023). An exploration of the barriers to community participation in development within Ompundja constituency. *Open Journal of Social Sciences*, 11(9), 399. <https://doi.org/10.4236/jss.2023.119026>

Sibagariang, D. R., et al. (2024). Pemanfaatan dana KIPK untuk mendukung pendidikan mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera. *Aladalah: Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 200. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1131>

Supriyadi, A., & Widodo, T. (2021). *Partisipasi warga dan kemandirian desa melalui BUMDes*.

Wahyudi, E. (2019). *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui musyawarah desa*.

Wilil, M., & Aedah, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 155. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i3.2800>

Yulianto, R. (2021). *Pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa*.